
Upaya USAID dalam Membantu Mewujudkan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia tahun 2016-2021

Louisia Vidiana¹⁾, Putu Ratih Kumala Dewi²⁾, A.A. Bagus Surya Widya Nugraha³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana.

Abstrak

IUU Fishing merupakan salah satu hambatan terbesar menuju tercapainya maksimalisasi potensi perikanan Indonesia dan juga tujuan pemerintah untuk dapat menerapkan pengelolaan perikanan berkelanjutan. WPP-NRI 715 merupakan wilayah fokus utama karena berada di Kawasan Coral Triangle, memiliki tingkat IUU Fishing yang tinggi dan nilai tingkat pemanfaatan dengan rata-rata berkategori *over-expolited*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif untuk menjabarkan mengenai upaya USAID dalam membantu pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pengelolaan perikanan berkelanjutan dengan menggunakan data yang diperoleh melalui proses *secondary analysis*. Hasil analisis yang menggunakan konsep bantuan luar negeri, blue economy dan sustainable fisheries menunjukkan bahwa USAID kemudian berupaya untuk menyelaraskan fokus utama pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan blue economy dalam bidang kelautan dan perikanan. Proyek USAID SEA terdiri dari beberapa program yakni: pengimplementasian EAFM, pengembangan MPA dan jejaring MPA, perencanaan tata ruang laut, penegakan hukum, peningkatan penyadartahuan melalui pembentukan pejuang laut dan pembentukan insentif tata kelola laut melalui implementasi Fairtrade.

Kata-kunci: Bantuan Luar Negeri, *Blue Economy*, Perikanan Berkelanjutan, USAID SEA, WPP-NRI 715

Abstract

IUU Fishing is one of the biggest obstacles to fully utilizing Indonesia's fishery potential and the government's goal to implement sustainable fisheries management. WPP-NRI 715 is selected as the main focus as it has the strategic position of being in the Coral Triangle area, high level of IUU fishing, and the value of the utilization rate, which on average was in the over-exploited category. This study is a descriptive qualitative study to describe USAID's efforts in helping the Indonesian government to actualize sustainable fisheries management using data collected through secondary analysis. The result of the analysis, using the concepts of foreign aid, blue economy, and sustainable fishery, showed that USAID tried to develop the USAID SEA program by aligning it with the main focus of the Indonesian government to implement the blue economy in the marine and fisheries sector. USAID SEA project is carrying out several programs: implementing EAFM, developing MPA and MPA networks, marine spatial planning, law enforcement, increasing awareness through the formation of SEA Champions, and establishing marine governance incentives through the implementation of FairTrade.

Keywords: *Blue Economy, Foreign Aid, Sustainable Fisheries, USAID SEA, WPP-NRI 715*

Kontak Penulis

Louisia Vidiana

Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

E-mail : Louisiavidiana@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan maritim dengan kekayaan laut yang melimpah. Indonesia memiliki luas lautan sebesar 5.8 juta km² dengan garis pantai yang mencapai 95.181 km dengan luas lautan dangkal sebesar 24 juta hektar (Jaelani dan Basuki, 2014). Untuk dapat menunjang efektifitas pengelolaan wilayah perairan yang sangat luas tersebut, KKP Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18 Tahun 2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Regulasi tersebut kemudian mengatur pembagian perairan menjadi 11 bagian Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).

Indonesia merupakan negara produsen hasil laut terbesar kedua di dunia dengan menyerap >6 juta tenaga kerja (California environmental associates, 2018; Zelasney, Ford, Westlund, Ward & Peñarubia, 2020). Menurut data tahun 2003 hingga 2014, Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan angka produksi perikanan yang stabil yakni lebih dari 30 persen (KKP dan USAID, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi kelautan Indonesia terbilang cukup tinggi. Adapun Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan, menyebutkan bahwa sektor kelautan Indonesia memiliki potensi sebesar USD 1.33 triliun atau sekitar Rp 19.950 triliun yang kemudian dapat menyerap sebanyak 45 juta tenaga kerja di Indonesia (KKP, 2020). Dengan besarnya potensi tersebut sudah seharusnya Indonesia dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut untuk dapat mendorong pembangunan ekonomi nasional.

Namun faktanya Indonesia mengalami kerugian sekitar USD 20 miliar pertahunnya

akibat IUU Fishing atau *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (Chapsos dan Hamilton, 2019). Adapun sebesar 30 persen dari total keseluruhan produk laut IUU Fishing berasal dari Indonesia (Chapsos dan Hamilton, 2019). IUU Fishing merupakan ancaman bagi keberlangsungan perikanan berkelanjutan jangka panjang dan produktivitas ekosistem serta terhadap kondisi sosio-ekonomi komunitas nelayan berskala kecil (Christensen, 2016). Sebanyak 65 persen terumbu karang di wilayah Indonesia mengalami kerusakan permanen akibat maraknya praktik IUU Fishing (Chapsos dan Hamilton, 2019).

Pemerintah Indonesia kemudian mengambil beberapa langkah untuk mengatasi permasalahan IUU fishing tersebut. Pertama, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di WPP-NRI pada 1 Januari 2017. Kedua, KKP membentuk Satuan Tugas yang berfungsi untuk dapat mengentaskan IUU Fishing yang dilakukan oleh kapal asing. Satuan tugas tersebut melaksanakan kebijakan tenggelamkan kapal yang didukung dengan UU No.45 Tahun 2009 yang menggantikan UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan merujuk kepada pasal 69(4) yang didalamnya memperbolehkan kapal dengan bendera asing untuk dibakar ataupun ditenggelamkan apabila terbukti melakukan IUU Fishing (California environmental associates, 2018).

Adapun upaya pengentasan IUU Fishing yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri belum cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini diakibatkan

oleh beberapa hal yakni, upaya yang masih berfokus kepada kapal asing, tidak menggunakan pendekatan *bottom-up* dan minim keterlibatan *stakeholder* dan faktor finansial dan kapabilitas yang belum memadai (California environmental associates, 2018).

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memiliki peran aktif dalam pengentasan permasalahan perikanan dunia. Hal tersebut ditunjukkan dengan Pemerintah AS yang mengeluarkan *presidential memorandum* pada 17 Juni 2014 yang mengatur mengenai pembentukan kerangka komprehensif untuk dapat melawan IUU Fishing dan *seafood fraud*. Amerika Serikat sendiri salah satu negara importir terbesar hasil laut asal Indonesia. Melihat permasalahan perikanan yang ada di Indonesia, Amerika Serikat yang merupakan negara yang gencar dalam pengentasan permasalahan perikanan dunia, juga turut menaruh perhatian kepada permasalahan IUU Fishing di Indonesia. Kemudian pada tahun 2016, Amerika Serikat melalui badan agensi bantuan USAID kemudian membentuk USAID *Sustainable Ecosystem Advanced* sebagai upaya nyata dalam membantu mengatasi permasalahan IUU fishing dan mendorong penerapan pengelolaan perikanan berkelanjutan. Penelitian ini kemudian akan berfokus untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh USAID dalam membantu mewujudkan perikanan berkelanjutan di Indonesia.

Adapun terdapat tiga buah literatur sebagai penunjang penelitian. Literatur pertama merupakan tulisan dari Putu A. Sayoga, Suksma Sushanti dan Putu Titah K. Resen dengan judul Bantuan USAID kepada Indonesia dalam Menangani Kasus Avian Influenza (AI) di Indonesia pada Tahun

2006-2010. Selanjutnya, sebagai literatur kedua penelitian ini juga menggunakan tulisan dari Nilam Sari (2018) dengan judul Peran *United States Agency International Development* (USAID) dalam Konservasi Laut di Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Penelitian ini juga menggunakan tulisan dari Rendy Prayuda dan Dian V. Sary (2020) dengan judul Strategi Indonesia dalam Implementasi Konsep *Blue Economy* Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai literatur terakhir.

Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri merupakan upaya pemanfaatan sumber daya publik, yang dapat berupa dana tunai, barang, *technical advice* dan keringanan hutang, dengan cara melakukan pemindahan secara sukarela dari pihak donor dengan tujuan utama memberikan perubahan positif dan meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat pihak resipien (Lancaster, 2007; Holsti, 1983). Pihak donor merupakan pihak yang memiliki kuasa dalam menentukan pihak resipien, jumlah bantuan yang diberikan, periode pemberian bantuan dan tata cara pemberian bantuan tersebut (Apodaca, 2017). Pemberian bantuan luar negeri juga memberikan pihak donor akses untuk dapat mempengaruhi kebijakan domestik negara resipien (Apodaca, 2017). Apodaca (2017) juga menyatakan bahwa melalui pemberian bantuan luar negeri, pihak donor dapat meningkatkan citra dan pengaruhnya dalam komunitas internasional.

4 tujuan bantuan luar negeri (Lancaster, 2007):

a. *Diplomacy*

bantuan luar negeri sebagai instrumen yang digunakan oleh pihak donor untuk dapat

memiliki akses tinggi terhadap negara resipien.

b. *Development*

instrument untuk dapat meringankan permasalahan negara resipien dengan membantu mencapai stabilisasi ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Bantuan luar negeri juga dapat digunakan untuk dapat membiayai proyek pembangunan infrastruktur dasar, pendampingan teknis, pengembangan layanan, dan hal lainnya yang dapat membantu meringankan krisis negara resipien.

c. *Humanitarian Relief*

Bantuan kemanusiaan dilakukan dengan memberikan bantuan kepada negara yang mengalami bencana alam ataupun *man-made crisis* dengan jumlah korban yang signifikan dan tidak memiliki kapabilitas penanganan yang memadai.

d. *Commercial*

Komersil, merujuk kepada tujuan laten kepentingan negara donor dalam pemberian bantuan luar negeri tersebut.

Lancaster (2007) juga menyatakan bahwa untuk memenuhi tujuan yang diatur oleh donor, bantuan luar negeri kemudian dapat dialokasikan untuk pengembangan aktivitas dan kapasitas (*expand activities and capacity*) serta sebagai insentif (*act as incentive*). Hal tersebut merujuk kepada bantuan luar negeri sebagai instrument yang mendorong negara resipien mengembangkan kapasitas dan kegiatan untuk dapat mencapai tujuan dari bantuan tersebut.

Blue Economy

Blue economy adalah paradigma yang mendorong pengembangan sektor perikanan dan kelautan untuk dapat mendorong perekonomian dengan tidak

melupakan penjaminan terhadap kelestarian lingkungan dalam jangka panjang yang kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan komunitas pesisir (Syarif C. Sutardjo, 2012; World Bank, 2017). Konsep *blue economy* memiliki ide yang sejalan dengan rencana pembangunan global atau SDGs ke-14 yakni *life below water*. Konsep *blue economy* dalam praktiknya sendiri merupakan konsep multi-sektor sehingga membutuhkan keterlibatan dari berbagai *stakeholder* terkait untuk dapat menghindari adanya konflik kepentingan dan juga untuk dapat memastikan keberhasilan implementasi konsep tersebut (Bappenas, 2021). Konsep *blue economy* memiliki elemen *triple bottom line* yang saling berkaitan yakni keberlanjutan lingkungan/*environmental*, pembangunan ekonomi/*economy*, dan keadilan sosial/*social* (Elia dan Indrajaya, 2022).

Penerapan *blue economy* harus mencakup empat aspek:

- a. Aspek ekonomi, merujuk kepada pemilihan metode kegiatan penyerapan sumber daya yang dapat mencapai pertumbuhan ekonomi secara maksimal dan juga menghindari kerusakan lingkungan (Sari dan Muslimah, 2020).
- b. Aspek sosial, merujuk kepada pembangunan ekonomi berbasis *blue economy* yang tidak hanya berfokus kepada peningkatan pendapatan namun juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari masyarakat target sehingga dapat menjamin ketersediaan kesempatan kerja yang layak (Sari dan Muslimah, 2020). Adapun hal ini juga diharapkan membangun kesetaraan gender dalam komunitas pesisir sehingga dapat

- mendorong peran perempuan dalam sektor ekonomi pesisir (Bappenas, 2021).
- c. Aspek lingkungan, merujuk kepada penerapan *blue economy* yang memiliki kontribusi positif terhadap pengelolaan sumber daya dengan mengupayakan pembangunan berkelanjutan dan pengintegrasian pengelolaan wilayah pesisir (Sari dan Muslimah, 2020; Bappenas, 2021).
 - d. Adanya peningkatan ketahanan dan keberlanjutan sektor berbasis laut untuk menguatkan pembangunan berkelanjutan dan inklusif sehingga dapat menjamin keberlangsungan penerapan aspek *blue economy* ke depannya (Sari dan Muslimah, 2020; Bappenas, 2021). Hal ini dapat dilakukan dengan adanya keterlibatan dan komitmen penuh dari pemerintah serta upaya *research and development* yang berisikan inovasi-inovasi baru sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan yang akan terjadi di masa mendatang (Sari dan Muslimah, 2020).

Sustainable Fishery

Sustainable fishery atau perikanan berkelanjutan adalah pengelolaan dan pemeliharaan kualitas, diversitas, dan ketersediaan sumber daya perikanan yang memadai guna pemanfaatan masa sekarang dan mendatang (Pilling dan Payne, 2008). Perikanan berkelanjutan dalam praktiknya meliputi, pembangunan pengelolaan sumber daya berbasis pendekatan ekosistem, pengaturan total tangkapan yang diizinkan, dan regulasi modifikasi alat tangkap.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian dengan deskriptif kualitatif, yang menggunakan

teknik *secondary analysis* dengan sumber data sekunder.

Dalam penelitian hubungan internasional terdapat variabel-variabel yang kemudian dapat mempengaruhi pemilihan tingkat analisis (Mas'ood, 1990). Pertama, variabel dependen atau unit analisis merujuk kepada aspek yang hendak digambarkan dan dijelaskan lebih lanjut perilakunya (Mas'ood, 1990). Kedua, variabel independent atau unit eksplanasi merujuk kepada aspek yang diamati karena bersifat mempengaruhi unit analisis. Dalam penelitian ini unit eksplanasi merujuk kepada upaya yang dilakukan oleh USAID melalui proyek USAID SEA dengan unit analisis yakni perikanan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini kemudian memiliki tingkat analisis sistem internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sektor Perikanan di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan luas lebih dari 190 juta hektar yang memiliki kekayaan laut yang melimpah. Indonesia sendiri adalah negara maritim dengan 70 persen dari keseluruhan wilayahnya berupa perairan (Sari dan Muslimah, 2020). Pemerintah Indonesia membagi wilayah perairannya ke dalam sebelas WPP-NRI dengan tujuan untuk melakukan efisiensi pengelolaan. WPP-NRI 715 merupakan salah satu WPP-NRI yang memiliki keanekaragaman hasil laut yang melimpah (Albasri dan Pratama, 2019). WPP-NRI 715 sendiri terletak di area segitiga terumbu karang dunia. WPP-NRI 715 seluas 47,5 juta hektar memiliki 22 kawasan konservasi seluas 3.884.826 hektar (Darilaut.id, 2018).

WPP-NRI 715 memiliki sembilan komoditas perikanan utama yakni ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar (non tuuna

cakalang), ikan demersal, ikan karang, udang penaeid, lobster, kepiting, rajungan dan cumi-cumi (Kepmen KP No. 47 tahun 2016). Adapun tujuh dari keseluruhan komoditas tersebut memiliki tingkat pemanfaatan *over-exploited* (Diolah dari Kepmen KP No.47 tahun 2016). Komoditas dengan kategori *over-exploited* tersebut harus dikurangi penangkapannya untuk dapat menjaga ketersediaan stok sumber daya tersebut agar tidak punah (Kepmen KP No.47 Tahun 2016). Adapun penyebab utama dari hal tersebut adalah praktik IUU Fishing yang tidak sesuai dengan regulasi kegiatan dan tingkat pemanfaatan sumber daya.

Pemerintah Indonesia sendiri mulai menekankan konsep *blue economy* dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan isi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam KTT Rio+20 di Rio de Janeiro, Brasil pada Juni 2012, bertema upaya bersama menuju keberlanjutan (Nurhayati, 2013). Dalam pidatonya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa "*blue economy is our next frontier*" menekankan mengenai keseriusan Indonesia dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan dengan basis *blue economy* dan kesiapan dalam memimpin agenda global tersebut (Dewan Kelautan Indonesia, 2012; Nurhayati, 2013). Adapun strategi pembangunan nasional yang dituangkan dalam UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan kebijakan pembangunan kelautan nasional memiliki keselarasan dengan konsep *blue economy* (Dewan Kelautan Indonesia, 2012).

Penerapan *blue economy* sendiri membutuhkan keterlibatan dan komitmen

yang sinergi dari berbagai pihak dalam sektor kelautan dan perikanan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta/*stakeholder*, dan komunitas pesisir. Faktanya masih terdapat berbagai hambatan dalam penerapan *blue economy* di Indonesia, seperti halnya kurangnya koordinasi antara instansi sektor kelautan dan perikanan yang kemudian memberikan celah bagi para pelaku IUU Fishing, kapasitas sumber daya pendukung yang belum memadai dan pembangunan yang tidak merata (California environmental associates, 2018).

Upaya USAID melalui Proyek SEA

Amerika Serikat melalui badan agensi bantuan USAID memberikan bantuan luar negeri berupa pembentukan proyek USAID *Sustainable Ecosystem Advanced* (SEA). Sejalan dengan Apodaca (2017) yang menyatakan bahwa pihak donor memiliki *power* dalam menentukan pihak resipien dan mekanisme pemberian bantuan, Proyek USAID SEA sendiri merupakan proyek bantuan luar negeri dalam bentuk hibah yang diberikan kepada pemerintah Indonesia dengan mandat pelaksanaan diberikan kepada Tetra Tech dan memiliki jangka waktu lima tahun dari 2016 hingga 2021. Proyek USAID SEA sendiri dapat dikategorikan sebagai bantuan luar negeri dengan tujuan *development* dikarenakan dalam prosesnya berupaya untuk membantu Indonesia dalam pembangunan tata kelola perikanan berkelanjutan untuk dapat mengatasi permasalahan perikanan di WPP-NRI 715. Adapun program dalam proyek tersebut disusun oleh USAID dan mitra pelaksana dengan mencerminkan tujuan awal dengan cara mengembangkan aktivitas dan kapasitas (*expand activities and capacity*) pemerintah Indonesia dengan turut

melibatkan berbagai *stakeholder* terkait dan masyarakat pesisir dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Perikanan berkelanjutan sebagai fokus utama proyek USAID SEA sangat berkaitan erat dengan posisi Amerika Serikat sebagai negara donor. Pemberian bantuan luar negeri dapat membantu meningkatkan citra dan pengaruh negara donor dalam komunitas internasional (Apodaca, 2017). Proyek USAID SEA diharapkan membantu agenda *Security Campaign* yang dapat mendorong posisi Amerika Serikat sebagai pemimpin dalam konservasi internasional (Natural Security). Agenda *Natural Security Campaign* sendiri meliputi berbagai upaya konservasi internasional yang dapat berkontribusi terhadap kebijakan luar negeri dan meningkatkan kepentingan ekonomi dan keamanan Amerika Serikat di seluruh dunia (Mordhorst, 2021; Natural Security). Pelaksanaan proyek USAID SEA diharapkan mampu meningkatkan kapasitas ekspor hasil laut Indonesia ke Amerika Serikat yang merupakan salah satu negara importir terbesar. Hal ini juga didorong oleh keinginan Amerika Serikat untuk mengurangi ketergantungan kebutuhan kepada negara-negara pemasok utama lainnya (Kemenperin, 2012).

Pelaksanaan proyek USAID SEA dilakukan oleh Tetra Tech bersama dengan himpunan mitra. Hal ini kemudian sejalan dengan penerapan konsep *blue economy*, yang merupakan fokus utama pemerintah Indonesia, yang dalam praktiknya membutuhkan keterlibatan berbagai *stakeholder* untuk memitigasi potensi konflik kepentingan yang kemudian dapat menjamin keberhasilan pelaksanaannya (Bappenas, 2021). Konsorsium tersebut

terdiri dari tiga belas mitra pelaksana yakni, WWF-Indonesia, *Wildlife Conservation Society*, MDPI, *Reef Check Indonesia*, Asosiasi AP2HI, RARE Indonesia, *Indonesia Locally Managed Marine Area*, Universitas Kristen Papua, Universitas Negeri Papua, *Coral Triangle Centre*, *Marine Change*, CI, dan *The Nature Conservancy* (USAID, 2017; KKP dan USAID, 2021).

Implementasi EAFM kedalam RPP

Mitra pelaksana proyek USAID SEA berupaya untuk mengadaptasi pendekatan EAFM (*Ecosystem Approach to Fisheries Management*) ke dalam Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP). Pendekatan EAFM atau pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem sendiri adalah sebuah konsep yang dalam prosesnya berupaya untuk menyelaraskan antara tujuan sosial ekonomi dalam pengelolaan perikanan dengan turut memberikan perhatian terhadap pengetahuan menyeluruh mengenai komponen biotik, abiotik dan hubungan antara manusia dalam ekosistem perairan yang kemudian dilakukan dengan sebuah sistem yang inklusif dan berkelanjutan (FAO, 2003).

Blue economy memiliki elemen *triple bottom line* yang saling berkaitan satu dengan lainnya yakni keberlanjutan lingkungan, pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial (Elia dan Indrajaya, 2022). Dalam prosesnya EAFM berusaha untuk dapat menyeimbangkan tiga dimensi pengelolaan perikanan yakni, dimensi sumber daya perikanan, dimensi ekosistem dan dimensi sosial ekonomi. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam proses kegiatan penangkapan dan pemanfaatan selain mempertimbangan cara penangkapan sumber daya ikan untuk memenuhi permintaan pasar juga harus turut mempertimbangkan kondisi ekosistem

sebagai habitat yang mendukung keberlangsungan kehidupan sumber daya ikan itu sendiri.

Penerapan EAFM dilakukan dengan adanya pengumpulan data, penilaian stok, pengembangan strategi pemanfaatan perikanan serta pengimplementasian dan pelembagaan strategi pemanfaatan yang kemudian memberikan informasi status perikanan (KKP dan USAID, 2021). Strategi pemanfaatan perikanan yang dihasilkan tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan draft RPP dan strategi pemanfaatan perikanan yang disiapkan dan ditinjau oleh para peneliti KKP dan staf kebijakan Ditjen SDA, serta staf instansi terkait lainnya. Adapun pelaksanaan poin ini dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai peneliti dan staf teknis yang berasal dari Pusat Riset Perikanan Nasional, BRPL, DJPT tingkat nasional dan DKP tingkat provinsi serta akademisi lainnya yang terkait (Sari dan Sesrini, 2021).

Adapun poin program implementasi EAFM ini berhasil mencapai dan melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya. Jumlah wilayah yang berhasil mengalami perbaikan dengan menerapkan EAFM adalah sebesar 22.501.015 ha dengan target awal yakni sebesar 5.159.774 ha (USAID, 2021).

Pengembangan dan pengelolaan MPA

Untuk menjamin penerapan konsep *blue economy* dibutuhkan adanya pelaksanaan aspek lingkungan yang kemudian berkontribusi menciptakan kegiatan pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab (Sari dan Muslimah, 2020; Bappenas, 2021). Penerapan *blue economy* dalam prosesnya berusaha untuk melakukan eksplorasi pemanfaatan

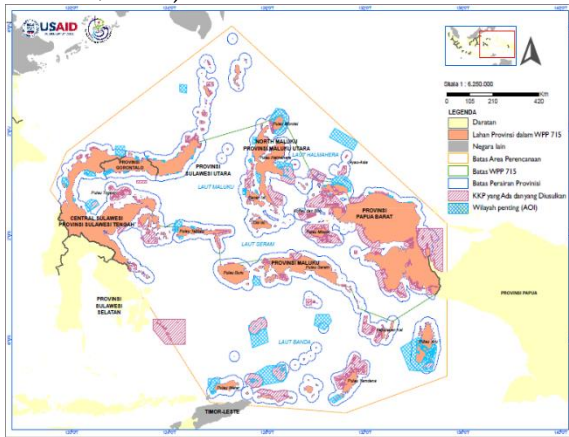
sekaligus konservasi sumber daya secara bersamaan (Wahyudin dkk, 2022). Dalam upaya ini USAID SEA kemudian berupaya melakukan identifikasi wilayah perairan untuk melakukan zonasi wilayah pemanfaatan sumber daya.

Kawasan Konservasi Perairan atau *Marine Protected Area* merupakan Kawasan yang dilindungi dan bersistem zonasi untuk mewujukan pengelolaan secara berkelanjutan (KKP, 2018). Proses perencanaan dan pengembangan MPA tersebut didorong oleh ketersediaan data lokasi terkait, seperti informasi dasar, tujuan dan mekanisme pengelolaan. Wilayah perairan yang dinilai vital (atau disebut sebagai *Marine area of interest/AOI*) diidentifikasi lebih lanjut dan diakui dalam rencana tata ruang laut provinsi (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/RZWP3K) kemudian mengikuti alur tahapan untuk dapat ditetapkan sebagai MPA (KKP dan USAID, 2021).

Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan. Pertama proses pengumpulan data komprehensif yang dibutuhkan sumber daya yang besar dan periode waktu yang lama. Kedua, adanya pemberlakuan UU No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur pemusatan pengelolaan perairan sejauh 12 mil garis pantai kepada pemerintah provinsi yang kemudian menyebabkan proses transisi yang sulit dikarenakan pemerintah provinsi belum memiliki kapasitas yang memadai.

Tiap-tiap MPA memiliki karakteristiknya masing-masing sehingga membutuhkan pendekatan khusus. Rani dan Muslimah (2020) menyatakan untuk dapat mengantisipasi sekaligus beradaptasi terhadap perubahan kondisi yang dapat

mempengaruhi penerapan *blue economy* dibutuhkan adanya upaya *research and development*. Mitra pelaksana USAID SEA kemudian mengambil langkah dengan membentuk jejaring MPA dengan tujuan untuk meningkatkan konservasi keanekaragaman di kawasan yang luas dan multiguna (KKP dan USAID, 2021). Jejaring MPA sendiri merupakan kumpulan MPA yang terkoneksi dengan nilai-nilai ekologi, sosial ekonomi dan budaya yang dirancang secara khusus dan dikelola secara efektif dengan tujuan untuk dapat mendorong keberhasilan MPA didalamnya (KKP dan USAID, 2021).



Gambar 1. Peta Jejaring MPA WPP-NRI 715 Proyek USAID SEA.

Kegiatan optimalisasi MPA di WPP-NRI 715 menghasilkan identifikasi terhadap 44 AOI untuk MPA dengan keseluruhan luas 5.336.477 ha dan usulan jejaring MPA yang harus dikaitkan seperti gambar 1 (KKP dan USAID, 2021). Selain itu juga ditetapkan SMART (*specific, measurable, action-oriented, relevant, and time-bound*) sebagai tujuan dalam proses pengelolaan dan perancangan MPA (KKP dan USAID, 2021).

Perencanaan Tata Ruang Laut

Perencanaan tata ruang laut sendiri memiliki tujuan untuk mendukung

terciptanya pengelolaan dan alokasi sumber daya dan ruang laut yang baik antara *stakeholder* terkait (Bappenas, 2021). Tata ruang laut juga merupakan faktor penting dalam *blue economy* dikarenakan dapat membantu *stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan berbasis *blue economy* (Bappenas, 2021). Pengimplementasian sistem tata ruang laut sendiri diharapkan dapat mengatasi permasalahan mengenai sengketa alokasi ruang laut dan pesisir, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya oleh pemerintah daerah yang bersebelahan, serta peningkatan persaingan kegiatan ekonomi para aktor ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya (Bappenas, 2021).

Dalam tingkat nasional, mitra pelaksana USAID SEA membantu dalam proses penyusunan RZWP3K dan pengembangan SEANODE (KKP dan USAID, 2021). SEANODE adalah portal informasi tata ruang laut daring yang bertujuan untuk mendorong transparansi prosedur lisensi dan perizinan dalam perairan provinsi (KKP dan USAID, 2021).

Di tingkat provinsi, mitra pelaksana USAID SEA berupaya untuk membantu penyesuaian proses perencanaan tata ruang laut dengan nilai budaya dan sosial untuk mendukung keberhasilan implementasi hal tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pendekatan khusus yang dilakukan oleh mitra pelaksana USAID SEA terhadap 67 suku bangsa di Provinsi Papua Barat. Pendekatan khusus tersebut dilakukan dengan pembentukan satuan tugas yang terdiri dari pejabat yang berasal dari pemerintah provinsi, LSM, akademisi dan kementerian terkait di tingkat nasional. Satgas tersebut kemudian berupaya untuk membangun komunikasi dengan

perwakilan suku untuk mengintegrasikan Kawasan dengan hak adat eksklusif ke dalam rencana tata ruang laut dengan tahapan yang disusun oleh mitra pelaksana proyek USAID SEA (KKP dan USAID, 2021). Hal tersebut kemudian memberikan kewenangan hak eksklusif kepada penduduk pesisir Provinsi Papua Barat untuk dapat melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah adat 12 nm dari garis pantai tanpa perlu izin, kecuali wilayah tersebut bersinggungan dengan wilayah inisiatif pengelolaan milik pemerintah (KKP dan USAID, 2021).

Penegakan Hukum

Dalam implementasi *blue economy* turut menekankan kepada target pembangunan, tata cara meminimalisir ancaman dan pengaturan mengenai pihak yang berkontribusi terhadap dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh kegiatan pemanfaatan sumber daya (Bappenas, 2021). Hal tersebut membutuhkan keterlibatan dan komitmen pemerintah yang kemudian berperan sebagai pengambil dan penyelenggara kebijakan mengenai aktivitas pengelolaan perikanan secara berkelanjutan (Sari dan Muslimah, 2020). Penegakan hukum di Indonesia sendiri memiliki hambatan dikarenakan minimnya sumber daya dan kapasitas yang mendukung, kebijakan dan instansi yang masih bersifat tumpang tindih satu dengan lainnya serta adanya perbedaan nilai dan budaya antar daerah.

Dalam tingkat nasional, proyek USAID SEA mendorong proses ratifikasi Port Measures Agreement (PSMA), perjanjian internasional yang mengatur mengenai pemberantasan penangkapan ikan secara IUU dengan melarang kapal IUU untuk

menurunkan hasil tangkapannya di Pelabuhan. Upaya ini juga mencakup kerangka kerja yang bertujuan untuk dapat meningkatkan dan memberdayakan kelompok pengawas masyarakat (pokmaswas) dan sistem pengawasan berbasis masyarakat (sismaswas) (KKP dan USAID, 2021).

Di tingkat provinsi, proyek USAID SEA berfokus pada ancaman penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing/DF*). Mitra Pelaksana USAID SEA sendiri berhasil melakukan identifikasi terhadap 120 area di WPP 715 yang rentan terhadap praktik DF (KKP dan USAID, 2021). Dalam pelaksanaan upaya ini proyek USAID SEA turut menggandeng pemerintah provinsi Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat, serta Dirjen PSDKP.

Kegiatan Penyadartahuan Melalui Pembentukan Pejuang Laut

Dalam prosesnya, pelaksanaan pembangunan ekonomi berbasis *blue economy* harus dapat mengembangkan kualitas SDM dari masyarakat target (Sari dan Muslimah, 2020). Upaya tersebut dilakukan dengan cara memberikan pemberdayaan dan pembekalan alam untuk dapat meningkatkan pengetahuan mengenai pengembangan usaha perikanan yang kemudian dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat (Sari dan Muslimah, 2020; Wahyudin dkk, 2022). Sejalan dengan hal tersebut kemudian mitra pelaksana USAID SEA yakni CTC membentuk kelompok agen perubahan yang disebut sebagai Pejuang Laut atau *SEA Champion* pada November 2017. Pembentukan kelompok pejuang laut ini juga melibatkan instansi tingkat lokasi dan provinsi yakni Unit Pelaksana Pengelolaan

Pesisir dan Laut Sorong dan DKP provinsi. Keterlibatan pemerintah tersebut kemudian dapat membantu menjamin ketahanan dan keberlanjutan penerapan *blue economy* (Sari dan Muslimah, 2020).

Dalam proses pembentukan pejuang laut tersebut, mitra pelaksana mengidentifikasi individu yang menonjol di masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan gender yang kemudian dilatih untuk dapat menjadi katalis perubahan dalam komunitas terkait. Pelatihan tersebut dilakukan dalam sebuah ruang belajar yang mengadopsi nilai kesetaraan yang memberikan kesempatan bagi siapapun. Para pejuang laut tersebut diberi pelatihan mengenai modul yang berisikan mengenai (a) pengantar dan pengetahuan dasar MPA, (b) praktik perikanan berkelanjutan, (c) spesies terancam punah, terancam dan dilindungi/ETP, (d) pokmaswas, (e) teknis komunikasi publik (KKP dan USAID, 2021).

Pembangunan berbasis *blue economy* juga dapat mempengaruhi peningkatan kualitas aktivitas pemanfaatan laut kearah yang lebih ramah lingkungan yang kemudian dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan (Bappenas, 2021). Pejuang laut yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat kemudian juga dapat dengan mudah untuk menjangkau dan mempromosikan praktik perikanan berkelanjutan kepada masyarakat pesisir dengan lebih luas. Rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh para pejuang laut juga lebih mudah untuk diadopsi oleh komunitas dan masyarakat pesisir karena berasal dari salah satu anggotanya. Hal tersebut tersebut juga dapat mengarah kepada peningkatan yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Program pelatihan Pejuang laut sendiri berhasil memberdayakan 324 orang Pejuang laut yang kemudian menjangkau sebanyak 1.041 orang (KKP dan USAID, 2021).

Pembentukan Insentif Tata Kelola Laut Melalui Implementasi Fairtrade

Proses implementasi fairtrade dalam prosesnya membutuhkan bantuan dan dukungan yang tidak hanya berasal dari nelayan namun juga berbagai pihak lain seperti halnya organisasi non pemerintah (Suwecawangsa dan Dewi, 2022). MDPI, sebuah organisasi non pemerintah, yang sebelumnya telah gencar bekerja sama dengan kelompok nelayan tuna berskala kecil di Ambon dan Buru Maluku untuk mengimplementasikan praktik Fairtrade. Kemudian dengan dukungan dari proyek USAID SEA, MDPI kemudian mulai merambah lebih luas ke berbagai daerah lainnya di Maluku Utara. Mitra pelaksana USAID SEA juga turut melibatkan mitra dagang yakni Anova sebagai upaya untuk dapat mengembangkan jumlah lokasi pemasok hasil tangkapan ikan berlabel Fairtrade (KKP dan USAID, 2021).

Mitra pelaksana proyek USAID SEA berupaya untuk dapat membantu mewujudkan penerapan prinsip *Fair trade* karena dalam praktiknya turut mencerminkan keempat aspek dari *blue economy*. Dalam praktiknya *Fairtrade* merupakan gerakan alternatif yang berupaya untuk memberikan penjaminan harga yang adil dengan turut meningkatkan kondisi kelompok produsen baik secara sosial maupun lingkungan (Dewi dan Suwecawangsa, 2022). Hal tersebut kemudian dapat mencerminkan adanya keselarasan dengan *triple bottom line* dari *blue economy*.

Secara aspek ekonomi dan lingkungan dapat dilihat bahwa penerapan fair trade dalam praktiknya pemanfaatan sumber daya kelautan dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan. Karena dalam proses penerapan prinsip-prinsip fair trade dibutuhkan komitmen yang serius terhadap konservasi ekosistem kegiatan pemanfaatan perikanan yang berkelanjutan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan konsep tersebut. Untuk dapat memasuki pasar perikanan berkelanjutan, para nelayan harus melalui proses sertifikasi yang terlebih dahulu mengharuskan nelayan tersebut untuk memenuhi berbagai persyaratan standar dalam proses pemanfaatan sumber daya.

Aspek sosial dalam penerapan *blue economy* juga memberikan pengaruh terhadap pengembangan perempuan dalam sektor kelautan dan perikanan yang kemudian memberikan pengaruh positif kepada kesejahteraan komunitas pesisir (Bappenas, 2021). Adapun pemberdayaan komunitas pesisir sebagai bagian dari penerapan *fair trade* juga mendorong peningkatan keterlibatan nelayan dalam isu politik dalam komunitas seperti halnya pendidikan dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Pelaksanaan Fair Trade sendiri merupakan sebuah komitmen jangka panjang. Hal tersebut kemudian dapat mendukung aspek ketahanan dan keberlanjutan dalam *blue economy* karena dalam proses pelaksanaan prinsip *fair trade* juga turut menjamin keberlangsungan aspek-aspek *blue economy* lainnya.

MDPI melalui proyek USAID SEA ini berhasil menghubungkan >400 nelayan dalam membentuk 16 kelompok nelayan Fair Trade (KKP dan USAID, 2021). Jumlah

dana premium yang telah diterima oleh nelayan sejak tahun 2014 adalah sebesar \$880.000 dengan sekitar 30 persen dialokasikan untuk proyek konservasi ekosistem kelautan (KKP dan USAID, 2021).

Pelaksanaan Fair trade sendiri bukan merupakan solusi yang ampuh dalam mendukung pengelolaan laut. Langkah ini membutuhkan proses yang panjang, sumber daya yang besar dan dukungan pasar yang memadai (KKP dan USAID, 2021). Keberhasilan pelaksanaan fairtrade sendiri sebagian besar bergantung kepada ketersediaan permintaan pasar terhadap produk fair trade. Adapun minat dan permintaan produk fair trade dalam negeri sendiri masih sangat rendah sehingga mendorong pasar internasional sebagai target pasar utama. Hal ini kemudian membuat produk fair trade dalam negeri harus bersaing dengan produk fair trade dari negara lain.

PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa lembaga pembangunan internasional dapat membantu sebuah negara dalam mengatasi permasalahan kelautan dan perikanan domestik. Hal tersebut ditunjukkan dengan USAID sebagai sebuah Lembaga pembangunan yang kemudian memberikan bantuan luar negeri dalam bentuk proyek SEA yang bertujuan untuk membantu Indonesia mengatasi permasalahan perikanan IUU Fishing dan mencapai praktik pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPP-NRI 715. Bantuan luar negeri yang diberikan tersebut kemudian digunakan sebagai instrument untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai upaya untuk mencapai

tujuan dari bantuan yang tersebut. Proyek USAID SEA dilaksanakan bersama dengan berbagai mitra pelaksana yang dalam prosesnya menyelaraskan program dengan fokus utama pemerintah Indonesia yakni untuk menerapkan konsep *blue economy* dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan.

Dalam pelaksanaan program proyek USAID SEA, USAID bekerja sama dengan beberapa NGO terkait beserta dengan Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan masyarakat setempat. kemudian program-program dalam proyek USAID SEA yang dalam prosesnya berupaya untuk turut mendorong penerapan *blue economy* di Indonesia meliputi, implementasi EAFM dalam rencana pengelolaan perikanan, pengembangan dan pengelolaan MPA (*Marine Protected Area*), perencanaan tata ruang laut dan pesisir, penegakan hukum, pembentukan agen perubahan “Pejuang Laut” dan implementasi prinsip *Fair Trade*. Program-program tersebut menekankan kepada praktik pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, keberlanjutan lingkungan, pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kemudian merujuk kepada elemen-elemen dalam *blue economy*. Melalui pelaksanaan program-program tersebut USAID berupaya untuk membantu pemerintah Indonesia untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kegiatan untuk dapat mengimplementasikan mekanisme pengelolaan perikanan yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan yang disertai dengan pembentukan tata ruang laut dan Kawasan konservasi yang dapat mendukung hal tersebut. USAID juga berupaya untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat komunitas pesisir

dengan melakukan pemberdayaan yang berfokus kepada pembentukan komitmen praktik-praktik pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Pemberdayaan yang dilakukan juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait dana premium *fairtrade* yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian USAID juga membantu pengembangan kapasitas pemerintah dalam penegakan hukum untuk dapat menjamin ketahanan dan keberlangsungan dari program-program yang dilaksanakan tersebut.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Albasri, H. dan Pratama I. (2019). Potensi dan Pengelolaan Budi Daya Laut Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPPNRI) 715. Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan WPP-NRI 715, 978-623-7651-07-9. Hal-03259166.
- Apodaca, C. (2017). Foreign aid as foreign policy tool. In *Oxford research encyclopedia of politics*.
- Chapsos, I., dan Hamilton, S. (2019). Illegal fishing and fisheries crime as a transnational organized crime in Indonesia. *Trends in Organized Crime*, 22(3), 255-273.
- Christensen, J. (2016). Illegal, unreported, and unregulated fishing in historical perspective. In *Perspectives on oceans past* (pp. 133-153). Springer, Dordrecht.
- Elia, A., dan Indrajaya, K. (2022). The Relationship Blue Economy, Fishery Development Sustainable and Production Fishery. *Journal of Positive School Psychology*, 234-250.

- Jaelani, A. Q. dan Basuki U. (2014). *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya mencegah dan memberantas Illegal Fishing dalam membangun poros maritim Indonesia*. SUPREMASI HUKUM Vol.3, No.1.
- Kumala Dewi, P., & Suwecawangsa, A. (2022). Implementasi Fair Trade dalam Perdagangan Komoditas Kacang Mete dari Bali Timur. *Jurnal Kajian Bali (Journal Of Bali Studies)*, 12(1), 302-320. doi:10.24843/JKB.2022.v12.i01.p15.
- Nurhayati, S. (2015). "Blue and Economy Policy" and Their Impact to Indonesian Community Welfare. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 37-42.
- Pilling, G. M., dan Payne, A. I. L. (2008). Sustainability and present-day approaches to fisheries management— are the two concepts irreconcilable?. *African Journal of Marine Science*, 30(1), 1-10.
- Prayuda, R. dan Sary, D. (2019). Strategi Indonesia dalam implementasi konsep blue economy terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir di era masyarakat ekonomi Asean. *Indonesian Journal of International Relations*, 3(2), 46-64.
- Sari, D. A. A., & Muslimah, S. (2020). Blue economy policy for sustainable fisheries in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 423, Issue 1).
- Sari, Nilam. (2018). Peran United State Agency International Development (USAID) dalam Konservasi Laut di Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. *JOM FISIP Vol. 5 (1)*.
- SAYOGA, Putu Adi; SUSHANTI, Sukma; KAWITRI RESEN, Putu Titah. Bantuan usaid kepada indonesia dalam menangani kasus avian influenza (ai) di indonesia pada tahun 2006-2010. DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL), [S.I.], v. 1, n. 03, apr. 2015.
- Suwecawangsa, A. P., Dewi, P. R. K. 2022. *Fair Trade dan Perikanan Tuna di Indonesia (Analisa Peran Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia)*. PAPALELE: Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, 7(1): 1-10, DOI: <https://doi.org/10.30598/papalele.2023.7.1.1/>
- Wahyuddin, Y. A., Hidayat, R. M., & Verdiansyah, T. R. (2022). STRATEGI KEBIJAKAN BLUE ECONOMY INDONESIA DALAM Mendukung PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA ERA JOKO WIDODO. *Sriwijaya Journal of International Relations*, 2(2 (Des)), 70-87.
- Dokumen**
- FAO. (2003). *FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries*. Rome. ISBN 92-5-104897-5.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.47 tahun 2016 Tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- USAID. 2017. E-newsletter: Talking SEA Kaleidoscope 2017. Volume 1 No.1/DEC 2017. pp.1.
- Buku**

- BAPPENAS. (2021). *Blue Economy: Development Framework for Indonesia's Economic Transformation*. Jakarta: BAPPENAS.
- California Environmental Associates. (2018). *Trends in Marine Resources and Fisheries Management in Indonesia: A 2018 Review*.
- Dewan Kelautan Indonesia KKP. 2012. *Kebijakan Ekonomi Kelautan Dengan Model Ekonomi Biru*. Jakarta: KKP.
- Holsti, K.J. (1983). *International Politics: A Framework for Analysis 4th ed.* Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- KKP dan USAID (2018). *Kondisi Laut: Indonesia, Jilid Dua: Mengenal Lebih Dekat Jantung Perairan Indonesia Bagian Timur: Kondisi dan Dukungan Proyek SEA USAID*. Jakarta, pp.114.
- KKP dan USAID. (2021). *Sustaining Indonesia's Marine Environment: Lesson Learned from the USAID Sustainable Ecosystems Advanced Project*. Jakarta: Grafindo.
- Lancaster, C. (2007). *Foreign aid: Diplomacy, development, domestic politics*. University of Chicago Press.
- Mas' oed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi*. LP3ES, Yogyakarta.
- Sumber Online**
- Darilaut.id. WPP 715 Tertinggi Persentase Kawasan Konservasi Laut di Indonesia. Diakses pada 1 Maret 2023 dari <https://darilaut.id/berita/wpp-715-tertinggi-persentase-kawasan-konservasi-laut-di-indonesia>.
- Kemenperin. (2012). Ekspor Perikanan Ditopang Permintaan Amerika Serikat. Diakses pada 14 April 2023 dari <https://agro.kemenperin.go.id/berita/334-ekspor-perikanan-ditopang-permintaan-amerika-serikat>.
- KKP. (2020). Menteri Edhy Optimis Sektor Kelautan dan Perikanan Bisa Jadi Andalan Ekonomi Nasional. Diakses pada 7 februari 2023 dari <https://kkp.go.id/artikel/22637-menteri-edhy-optimis-sektor-kelautan-dan-perikanan-bisa-jadi-andalan-ekonomi-nasional>.
- Mordhorst, K. (2021). In Indonesia, Illegal Fishing Hurts More than Just fish. Diakses pada 14 April 2023 dari US Global Leadership Coalition: <https://www.usglc.org/blog/in-indonesia-illegal-fishing-hurts-more-than-just-fish/>.
- Natural Security. *Natural Security Overview* [versi pdf] dari <https://naturalsecurity.us/wp-content/uploads/2019/02/Natural-Security-Overview.pdf>.
- World Bank: United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2017). The Potential of the Blue Economy: Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries. Diakses dari <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/a36b153d-0284-58b0-b7b3-35a26438f31b>.